SIPISSANGNGI
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/sipissangngi
ISSN(e): 2775–2054

SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PELATIHAN ETIKA DAN TATA CARA PERSIDANGAN LEGISLATIF

Article history
Received: Februari 2021
Revised: Maret 2021
Accepted: Maret 2021
DOI: 10.35329/sipissangngi.v1i1.1870

[1*]Tri Anggraini, [1]Anita Lassa
[1]Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Timor. Indonesia

*Corresponding author
trianggraini1994@gmail.com

Abstrak

Salah satu profil lulusan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik unimor adalah menjadikan lulusan seorang legislator, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pembekalan bagi para calon lulusan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah Teknik persidangan. Sasaran kegiatan ini adalah Mahasiswa Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) tahapan kegiatan dalam pelatihan etika dan tata cara persidangan legislatif ini antara lain: 1). Persiapan, 2). Pelaksanaan, dan 3). Evaluasi. Dalam pelatihan ini didapatkan adanya peningkatan kemampuan mahasiswa yang dapat dilihat dari perbandingan nilai post-test dan pre-test yang sangat signifikan. Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa pelatihan Teknik persidangan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi peningkatan kemampuan *public speaking* mahasiswa. Pelatihan etika dan tata cara persidangan memiliki dampak yang sangat baik dan memberikan manfaat serta informasi bagi mahasiswa sebagai bekal mereka setelah lulus serta dalam kegiatan organisasi bagi mahasiswa. Kegiatan ini juga memberikan mahasiswa mengeksplor rasa ingin tahu dan kemampuan mahasiswa tentang etika dan tata cara persidangan legislatif yang baik.

Kata kunci: *Pelatihan, Sidang, Legislatif*

Gambar 1. Pelatihan Etika dan Tata Cara Persidangan Legislatif

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan Kualitas lulusan perlu adanya upaya dan kerja keras dari banyak pihak terkait, melalui kegiatan-kegiatan penunjang selain kegiatan peruliahan dikampus, Kegiatan-kegiatan ini hendaknya dapat dilakukan sebelum mahasiswa menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi sebagai bekal bagi mahasiswa untuk terjun kedunia kerja. Kegiatan-kegiatan ini juga hendaknya dapat berupa kegiatan yang menunjang soft skill mahasiswa sesuai dengan profil lulusan yang diharapakan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan pelatihan.

Kegiatan pelatihan bermanfaat karena dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu untuk bersaing dengan kompetitornya di dunia kerja. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan. (Sofyandi, 2018). Pelatihan juga merupakan proses yang bertujuan untuk mendidik dan melatih dari segi sikap dan keterampilan sehingga harapannya dapat bertanggung jawab dengen pekerjaannya suatu saat ini. Pelatihan juga menjadi alat yang cukup efektif sebagai upaya peningkatan kemampuan seseorang. Oleh karenanya, Penulis tertarik untuk membuat suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan calon lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan melakukan kegiatan Pelatihan Etika dan Tata Cara Persidangan Legislatif. Pelatihan ini diangkat didasari oleh kondisi isu-isu yang berkembang yang penulis temukan, bahwa kurangnya kegiatan-kegiatan pelatihan bagi mahasiswa sebagai upaya pengembangan Soft Skill. Pemilihan Isu soft Skill didasari pada analisis dari beberapa isu yang berkembang sehingga penulis berkesimpulan bahwa isu ini adalah isu yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.

Pelatihan ini juga sebagai upaya pendukung dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdidik pada perguruan tinggi tidak memiliki dasar soft skill sebagai pendukung. Salah satu upaya yang dilakukan penulis sebagai seorang dosen yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan soft skill upaya untuk menciptakan lulusan yang handal dan bedaya saing.

Pelatihan ini digunakan sebagai instrument untuk pengembangan soft skill mahasiswa berupa kemampuan analis dan argumentasi, harapannya kegiatan ini akan terus dikembangkan untuk pengembangan sumber daya manusia khusuanya sumber daya manusia yang terdidik yang berasal dari perguruan tinggi di perbatasan, Selain itu Pelatihan ini juga daapt digunakan sebagai upaya perbaikan moral (Mangkuprawira, 2004) sehingga stigma buruk bagi sumber daya manusia di perbatasan yang terbelakang bisa berangsur-angsur diperbaiki.

Pemilihan pelatihan etika dan tata cara persidangan legislative ini juga dilatar belakangi oleh salah satu profil lulusan di dua program studi yang ada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini adalah menjadikan lulusan sebagai seorang legislator. Oleh karenanya, perlu adanya pembekalan bagi para mahasiswa/i di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait teori tetang Teknik persidangan legislatif. Tidak hanya itu, pemahaman terkait teori persidangan ini juga dapat mahasiswa/i gunakan dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi kampus dan diluar kampus yang biasanya menjadikan Teknik persidangan ini sebagai mekanisme bagi pengambilan keputusan.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknik dan etika persidangan legislatif bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dilaksanakan dalam 7 tahapan kegiatan.

1. Melakukan Koordinasi dengan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan rekan-rekan Dosen Ilmu Adinistrasi Negara

   Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi terkait lokasi tempat kegiatan pelatihan,

mengkoordinasikan jadwal kegiatan pelatihan. Persiapan administrasi dan perlengkapan penunjang kegiatan pengabdian.

2. Melaksanakan Pre-test menggunakan Kuesinoer untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terkait dengan "Etika dan tata Cara Persidangan legislatif"
   Pr-test bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa, sehingga bisa dirancang metode apa yang akan digunakan dalam menyampaikan materi harapannya dengan dasar kuesioner ini metode yang digunakan tepat untuk pelatihan dan berdampak baik bagi pemahaman mahasiswa
3. Membuat Materi Pelatihan Etika dan Tata Cara Persidangan legislative berupa Paper dan bahan tayang.
   Pembuatan materi pelatihan berupa bahan materi dalam bentuk paper dan bahan tayang yang besumber dari bahan refrensi yang relavan. Materi yang dibuat diusahakan agar mudah dipahami bagi mahasiwa serta menjadikan ini sebagai pedoman bagi Himpunan Mahasiswa Jurusan untuk melakukan mekanisme persidangan nantinya.
4. Membentuk Kelompok menentukan pemain peran untuk persiapan melakukan simulasi "etika dan tata acara persidangan legislatif"
   Pembentukan kelompok diawali dengan menentukan jumlah mahasiswa perkelompok serta menentukan peran tiap mahasiswa dalam kelompok dan pemain peran.
5. Melaksanakan Pelatihan sekaligus mensimulasikan "etika dan tata acara persidangan legislatif"
   Pelatihan yang diberikan ini tidak hanya berfokus pada materi dan simulasi sidangnya, Namun juga berfokus pada etika dalam persidangan, hal ini diangkat untuk memberikan nilai-niai etika yang seharusnya juga diterapkan dalam sistem persidangan harapannya persidangan yang dilakukan tetap dapat mengedepankan etika-etika dalam mahasiswa, sehingga pelatihan ini dapat membentuk karakter mahasiswa yang memiliki etika dan budi pekerti yang luhur
6. Melaksanakan *post-test* untuk mengetahui pemahaman mahasiswa setelah dilakukannya "pelatihan etika dan tata cara persidangan legislatif"
   Penilaian siswa setelah melakukan pelatihan sangat penting untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa setelah melakukan pelatihan ini, kuesiner ini sangat penting untuk menjadi instrument evaluasi bagi penulis untuk memperbaiki sistem dan tata memberikan pelatihan sehingga harapannya komitmen penulis untuk terus memperbaiki diri dan membantu tercapainya visi dan misi Program Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yaitu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan.ketika mahasiswa sudah menguasai ilmu pengetahuan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dan observasi. Langkah awal yang dilakukan tim pelaksana untuk mengatasi permasalahan adalah 1). Koordinasi awal dengan pimpinan fakultas ilmu social dan ilmu politik serta rekan-rekan sesama dosen. 2). Melaksanakan Pre-test 3). Penyusunan materi dan media pelatihan, 4). Pembentukan kelompok simulasi 5). Pelaksanaan pelatihan Teknik dan tata cara persidangan legislative dan 6). Evaluasi hasil kegiatan. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

A. Persiapan Kegiatan Pelatihan

Pada tahapan persiapan ini terdiri dari kegiatan koordinasi dengan pmpinan dan rekan-rekan dosen, tahapan kegiatan pre-test, persiapan materi pelatihan dan pembagian kelompok persiapan simulasi etika dan tata cara persiangan legislative. Pada tahapan Awal persaipan kegiatan, penulis terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pimpinan Fakultas llmu social dan Ilmu Politik serta rekan-rekan dosen, dari hasil diskusi pimpinan fakultas ilmu social dan ilmu politik serta rekan-rekan dosen menyambut baikdan mendukung bagi terlaksananya kegiatan pelatihan ini. Dukungan diberikan berupa penguatan dan usulan serta saran bagi penulis demi terlaksananya baik kegiatan pelatihan.

Pada tahapan selanjutnya Penulis melaksanakan kegiatan pre-test yang diawali dengan persiapan instrument kuesioner dengan merumuskan harapan dari pembuatan kuesioner tersebut, apa yang akan diukur dar penyebaran kuesioner. Penulis juga meracang daftar pertanyaan ang mampu menjadi indikator pemahahaman mahasiswa. Dalam rancangan daftar pertanyaan ini penulis mencba merumuskan jenis pertanyaan berupa pertanyaan pilihan ganda dan essai dengan pertimbangan lebih luas menjangkau pemahaman mahasiswa. Pada tanggal 14 Maret 2020 penulis membagikan kuesioner yang telah dibuat kepada target responden yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu menjelaskan maksud, tujuan serta tata cara pengisian kuesioner kepada reponden. Pengelolaan Data dan analisis dilakukan penulis pada 15 Maret 2020 didapati hasil bahwa nilai rata-rata 40,12, ini menjadi indikator bahwa pemahaman mahasiswa terkait Teknik persidangan sangat rendah.

Gambar 2. Persiapan Pembagian Kuesioner

Gambar 3. Peserta mengisi Kuesione

Selanjutnya adalah pembuatan materi pelatihan dengan agenda mencari dan mengumpukan bahan refrensi baik melalui internet maupun buku di perpusakaan sesuai dengan kebutuhan pembuatan materi bahaan persidangan. Perumusan Kembali rancangandan bahan peaper dan bahan tayang yang digunakan pada pelatihan etika dan tata cara persidangan legisatif. Agenda terakhir dalam persiapan kegiatan pelatihan ini adalah membentuk kelompok secara acak dan menentukan pemain peran untuk persaipan melakukan simulasi etika dan tata cara persidangan legislative. Pengelompokan peserta dilakukan lebih dulu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup baik bagi peserta untuk mendiskusikan tema yang telah diberikan dengan harapan peserta telah lebih dahulu menyiapkan bahan materi simulasi persidangan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Penulis dapat melihat antusiasme yang sangat baik dari peserta pelatihan yang dapat dilihat dari keseriusan peserta dalam berdiskusi, bertanya dan Menyusun materi kajian bagi terlaksananya simulasi persidangan.

B. Pelaksanaan Pelatihan

Pada kegiatan ini, dilaksanakan kegiatan inti dari pelatihan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan. Pelaksanaan atau implementasi diartikan sebagai tindakan-tindakan yang diarahkan diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan. (Wahab, 2001). Kegiatan Pelatihan Etika dan Tata cara persidangan legislatif ini dilaksanakan dalam 2 (Dua) pertemuan dilakukan di Ruang Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan gambaran umum terkait banyak kasus persidangan legislatif khusunya yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa diajak berdiskusi tentang apa yang mahasiswa ketahui tentang persidangan legislative di Indonesia termaksud tentang fenomena kontemporer dari persidangan-persidangan legislative. Sebagian mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat rendah terkait mekanisme tata cara dan etika persidangan karena tata cara dan mekanisme persidangan tidak erat mahasiswa rasakan dalam kehidupan shari-hari. Untuk mengulik dan memancing diskusi mahasiswa penulis juga menggunakan video youtube atau berita online untuk menunjukkan terkait etika dan tata cara persidangan legislatif.

Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan mentransformasikan materi pelatihan. Agenda kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 25 Mare 219, dimana dalam agenda kegiata ini penulis membuat schedule kegiatan dan rancangan pelaksanaan kegaitan. Penulis mencoba mengefektifkan waktu. Agenda awal mentransformasikan materi peatiha berupa materi dasar metode persidangan. Selain materi-materi yang telah dijabarkan,

dalam setiap pemberian materi persidangan ini penulis juga menyelipkan memberikan materi berupa etika dalam melaksanakan kegiatan persidangan. Dalam hal ini penulis terus menekankan bahwa etika yang baik menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan seseorang dalam menarik perhatian dari orang lain dengan cara bertutur kata yang baik dan berpendirian yang baik.

Gambar 4. Penyampaian Materi Etika dan Tata Cara Persidangan Legislatif

Kegiatan pemberian materi pelatihan ini langsung dilajutkan dengan kegiatan simulasi etika dan tata cara persidangan. Dalam pelaksanaannya penulis dapat melihat antusiasme mahasiswa dalam mengikuti pelatihan ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang sebelumnya tidak terdaftar tetapi ikut serta karena mendapatkan infomrasi dari rekan-rekan mahasiswa. Antusiasme ini juga dapat terlihat dari semangat dan keaktifan peserta pelatihan untuk bertanyam berpendapat dan berdiskusi dalam sesi pemberian pelatihan etika dan tata cara persidangan ini. Simulasi Etika dan Tata Cara persidangan ini diawali pengelompokan peserta sesuai tugas, pokok dan fungsinya yang telah dibagi sebelumnya. Kegiatan ini berjaan dengan sangat lancer, aman dan kondusif hal ini memudahkan penulis untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu. Dalam pelaksanaan simulasi ini penulis terus mendampingi. Simulasi siding yang dilakukan adalah jenis persidangan pleno dimana setiap kelompok mewakili fraksi-fraksi di DPR dan membahas satu isu besar yang kemudian dibahas secara keseluruhan pada rapat ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini terbagi menjadi 5 kelompok 2 Kelompok Pro dan 3 Kelompok Kontra. Adapun materi bahasan yaitu terkait dengan isu kontemporer. ISu kontemporer sendiri dimaknai sebagai Sesutu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu kontemporer yang dipilih merupakan isu local di Provinsi NTT yaitu "Wacana Legalisasi Miras Lokal di Provinsi NTT". Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan sangat baik, terlihat dari keaktifkan peserta berbicara dan mengemukakan pendapat.

Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Simulasi Persidangan Legislatif

Gambar 6. Pelakasanaan Kegiatan Simulasi Persidangan Legislatif

Dalam Kegiatan penutup setelah pelaksanaan Simulasi Etika dan Tata Cara Persidangan ini dilajutkan dengan agenda evaluasi peserta pelatihan yang dibagi menjadi 2 agenda kegiatan lagi yaitu; kegiatan pertama dilakukan oleh peserta pelatihan dan kegiatan kedua penulis selaku pembimbing dan pemateri dalam pelaksanaan melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini perserta pelatihan telah mampu menganalisis dan mengevaluasi diri terkait kesalahan mereka secara etika dalam menyampaikan pendapat. Dari hasil Simulasi Etika dan Tata Cara Persidangan ini didapati kesimpulan bahwa mahasiswa sebenarnya telah mampu memahami Konsep-Konsep Dasar Etika dan Tata Cara Persidangan.

C. Evaluasi Kegiatan

Setelah rangkaian kegiatan inti pengenalan Teknik persidangan dan simulasi etika dan tata cara persidangan legislatif selesai, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan (Arikunto, 2003). Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang kemanfaatan pelatihan dan tingkat pemahaman materi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *post-test* dengan pertanyaan yang sama dengan kegiatan pre tes hal ini bertujuan untuk melihat pemahaman dan kejelasan materi yang telah disampaikan.

Gambar 7. Kegiatan Evaluasi *Post-Test*

Berdasarkan Hasil survei yang dilakukan penulis dengan merujuk pada hasil pre tes yang dilakukan pada 14 Maret 2019 kepada 42 mahasiswa dan hasil *post-test* yang dilakukan penulis 29 Maret 2019 kepada 37 mahasiswa. Penuils menggunakan pengukuran Crosstabulation untuk mengukur peningkatan kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah dilakukannya Pelatihan Etika dan Tata Cara Persidangan Legislatif. Pengukuran ini akan melihat lebih detail sejauh mana peningkatan kemampuan ataupun melihat adanya penurunan kemampuan mahasiswa dengan menggunakan jenis pertanyaan yang sama pada saat *pre-test* dan post tes.

Dalam hasil survei pada pertanyaan pertama didapati bahwa seluruh responden mengalami peningkatan kemampuan, hal ini terlihat dari 38 responden yang mengikut *pre-test* sebelumnya mendapatkan nilai 1 terjadi peningkatan sebanyak 31 responden mendapatkan nilai 4. Sedangkan 3 mahasiswa dalam *pre-test* mendapatkan nilai 2, total 2 responden mengalami peningkatakan mendapatkan nilai 4. Sedangkan 1 orang yang sebelumnya mendapatkan nilai 3 meningkat menjadi mendapatkan nilai 4. Dalam pertanyaan kedua 38 responden yang meningkuti pre tes dan mendapatkan nilai 1 mengalami peningkatan yaitu 30 orang mendapatan nilai 4. Sedangkan 3 orang responden tetap mendapatkan nilai 1. Responden lainnya yang mengalami peningkatan adalah 3 responden yang sebelumnya mendapatkan nilai 2 meningkatan mendapatkan nilai 4 yaitu sebanyak 2 responden. Sedangkan 1 responden pada saat *pre-test* mendapatkan nilai 4 dan pada saat *post-test* tetap mendapatkan nilai 4. Jadi, dalam pertanyaan kedua, 32 responden telah mengalami peningkatan pemahaman.

Dalam pertanyaan ke tiga, 42 responden yang sebelumnya mendapatkan nilai 1, 19 diantaranya mendaatkan nilai 4, 6 responden mendapatkan nilai 3, 3 responden mendapatkan nilai 3 dan 9 responden tetap mendapkan nilai 1. Jadi dari 42 respnden. Jadi dalam pertanyaan ketiga ada 28 responden yang mengalami peningkatan dan 9 mahasiswa tetap pada nilai 1. Sedangkan dalam pertanyaan ke empat, dari total 42 responden yang mendapatkan nilai 1, terjadi peningkatan yaitu 2 orang mendapatkan nial 4, 6 orang mendapatkan niali 4, 8 orang mendapatkan nilai 2 dan 15 orang tetap pada nilai 1. Dari total 2 orang masiswa yang mendapatkan nilai 2 tetap mendapatkan niali 2, 3 responden yang sebelumnya mendapatkan nilai 3 tetap mendapatkan nilai 3 dan 1responden yang mendapatkan nilai 1 mendapatkan nilai 4.

Berdasarkan hasil analisis angket, secara keseluruhan kegiatan pelatihan etika dan tata cara persidangan legislative ini sangat baik dan memberikan manfaat serta infomrasi bagu bagi mahasiwa sebagai bekal mereka setelah lulus dan dalam kegiatan organisasi bagi mahasiswa. Kegiatan ini juga memberikan mahasiswa mengeksplor rasa ingin tahu dan kemampuan mahasiswa tentang etika dan tata cara persidangan legislative yang baik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian yang telah dilakukan dan tujuan dari kegiatan pelatihan etika dan tata cara persidangan legislatif. Kegiatan Pelatihan Etika dan Tata Cara Persidangan Legislatif berjalan sesuai dengan rancangan, walaupun terdapat beberapa kendala namun telah dapat diatasi tanpa merubah tujuan dari kegiatanan. Kegiatan pelatihan ini memberikan efek positif Kepada mahasiswa yaitu meningkatkannya pengetahuan mereka tentang Metode persidangan, dilihat dari nilai *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti dibandingkan nilai pretest. Kegiatan pelatihan ini juga dapat memberikan semangat dan motivasi belajar mahasiswa untuk terus mengembangkan soft skill agumentasi dan analisis mahasiswa. Tata Cara persidangan legislative ini dapat digunakan sebagai instrument dalam kegiatan diskusi mahasiswa baik didalam maupun diluar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.Jakarta: BumiAksara

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

Herman Sofyandi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

KBBI, 2016. Kamus Besar Available at: Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui http://kbbi.web.id/pusat pada 08 Januari 2021 Pukul 08.30 WIB

Mangkuprawira, Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Ghalia Indonesia: Bogor.